

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk)

Oleh
M. An-Nabil Karindra

Sengketa kepemilikan tanah warisan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, khususnya ketika terjadi tumpang tindih antara penguasaan faktual dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Misalnya dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk, di mana Para Penggugat sebagai ahli waris sah Marsidi Husin menghadapi klaim kepemilikan dari Para Tergugat yang memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang telah dikuasai sejak tahun 1996. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pemilik tanah yang beritikad baik. Penelitian ini membahas pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kepemilikan tanah warisan berdasarkan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam pembuktian Perbuatan Melawan Hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi secara kumulatif, meliputi unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal. Tindakan Para Tergugat dalam mengajukan permohonan sertifikat, memecah, dan mengalihkan sertifikat atas tanah yang bukan haknya serta kelalaian Kantor ATR/BPN dalam melakukan penelitian fisik dan yuridis merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk dinilai telah sesuai dengan pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dan mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang beritikad baik, sekaligus menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sertifikat Ganda, Tanah Warisan

ABSTRACT**UNLAWFUL ACTS IN LAND OWNERSHIP DISPUTES DUE TO THE
ISSUANCE OF DOUBLE CERTIFICATES (Study of Decision Number
56/Pdt.G/2021/PN Tjk)**

By
M. An-Nabil Karindra

Inheritance land ownership disputes are legal issues that often occur in land practice in Indonesia, especially when there is an overlap between factual control and the issuance of land rights certificates. For example, in Decision Number 56/Pdt.G/2021/PN Tjk, where the Plaintiffs as the legal heirs of Marsidi Husin face ownership claims from the Defendants who obtained a certificate of ownership over land that has been controlled since 1996. This condition has the potential to harm landowners. In good faith This study discusses the fulfillment of the elements of tort in inheritance land ownership disputes based on Decision Number 56/Pdt.G/2021/PN Tjk and the suitability of judges' considerations in proving torts.

The research method used is a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The research data was obtained through a literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively.

The results of this study show that the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Civil Code have been fulfilled cumulatively, including elements of acts, tortious act elements, elements of error, elements of loss, and elements of causal relationships. The actions of the Defendants in applying for certificates, splitting, and transferring certificates for land that are not their rights and the negligence of the ATR/BPN Office in conducting physical and juridical research are acts that cause losses to the Plaintiffs. The Panel of Judges' consideration in Decision Number 56/Pdt.G/2021/PN Tjk is considered to be in accordance with the proof of tort and reflects legal protection for landowners in good faith, while emphasizing the importance of prudence in land administration to ensure legal certainty.

Keywords: Unlawful Acts, Dual Certificate, Inherited Land